



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

grupa

galeri hunian layak Indonesia

edisi 1



Setahun Kementerian PKP
Gotong Royong Membangun
Rumah untuk Rakyat

grya

Pelindung
Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab
Plt. Kepala Biro
Komunikasi Publik

Redaktur
Kepala Bagian
Pelayanan Publik dan
Publikasi
Erwin Alimudin

Penulis
Avifah Setiyani
Digna Margareth
Ilham Bintang
Indar Amila
Kinanti Juli
Michael Prilas
Raden Bintang Agna

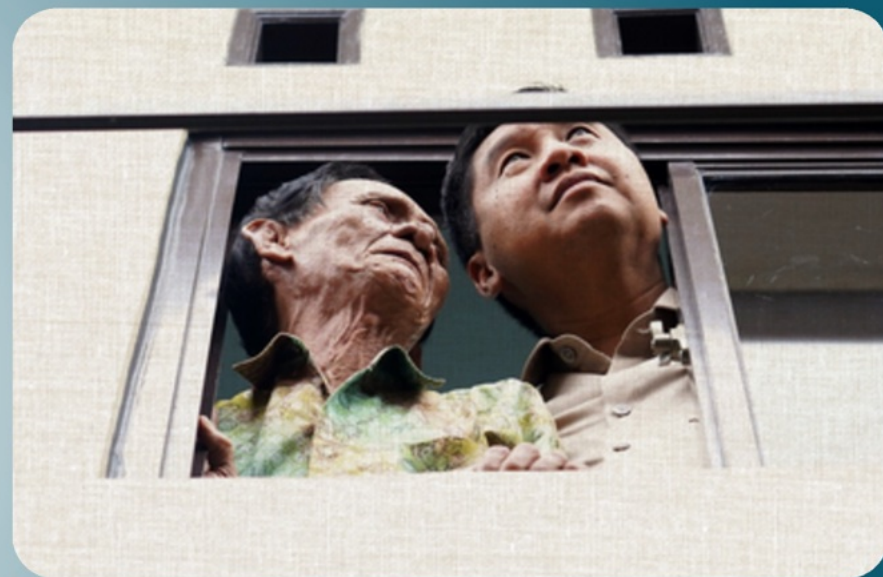
Editor
Erwin Alimudin

Desain Grafis
Digna Margareth
Michael Prilas

Fotografer
Bambang Ismanto
Fitrah Faizal
Refly April
Wahyu Ady

Diterbitkan Oleh
Sekretariat Jenderal
Kementerian
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Alamat Redaksi
Wisma Mandiri II, Jalan
Kebon Sirih Nomor 83,
Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI
Jakarta



Setahun Kementerian PKP Gotong Royong Membangun Hunian Layak

Setiap awal selalu punya cerita. Bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, satu tahun perjalanan ini bukan sekadar hitungan waktu, tetapi tentang membangun fondasi—menyusun arah, memperkuat sistem, dan mulai menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

Edisi perdana majalah ini hadir dengan tema “**Setahun Kementerian PKP: Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat**”. Tema ini menjadi refleksi atas langkah-langkah yang telah dimulai, sekaligus gambaran tentang perjalanan panjang yang masih akan ditempuh ke depan.

Di balik setiap program pembangunan, ada proses yang tidak sederhana. Perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, hingga pelaksanaan di lapangan yang melibatkan banyak pihak—semuanya bergerak dalam satu semangat yang sama: memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selama satu tahun ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang lebih profesional dan adaptif. Transformasi layanan, penguatan sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja kementerian secara menyeluruh.

Namun lebih dari itu, pembangunan perumahan bukan hanya tentang angka dan capaian fisik. Ada cerita di setiap rumah yang dibangun—tentang harapan baru, tentang kehidupan yang lebih layak, dan tentang masa depan yang mulai tertata.

Melalui majalah ini, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar informasi. Kami ingin membawa pembaca melihat lebih dekat—bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana kolaborasi terjalin, dan bagaimana dampaknya dirasakan langsung di lapangan.

Karena pada akhirnya, pembangunan perumahan adalah kerja bersama. Dan gotong royong adalah kunci untuk memastikan setiap langkah yang diambil bisa membawa manfaat yang lebih luas. Semoga edisi ini menjadi awal dari ruang berbagi cerita, inspirasi, dan kolaborasi yang lebih besar ke depannya.

Sekretaris Jenderal
Didyck Choiroel, S.Sos., M.Si.

- 02 Dapur Redaksi
- 03 Daftar Isi
- 04 Serambi
- 05 Jendela
- 07 Ruang Utama
- 15 Beranda
- 27 Kabar Program 3 Juta Rumah
- 31 Pojok Regulasi dan Kebijakan
- 33 Profil Daerah/Tokoh Inspiratif
- 35 Info Balai
- 37 Inovasi dan Teknologi Perumahan dan Kawasan
- 39 Kabar Warga
- 41 Gaya Hidup dan Arsitektur
- 43 Kolom ASN PKP & Opini Publik



Mengawali Langkah, Menghadirkan Dampak

Setiap rumah selalu diawali dari sebuah langkah kecil. Namun tahun ini, langkah itu membawa arah yang lebih besar.

3 Juta Rumah

Sebuah angka yang bukan sekadar target, tetapi cerminan dari upaya menghadirkan hunian layak bagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

Melalui edisi perdana ini, kami mengajak pembaca untuk melihat lebih dekat bagaimana berbagai program perumahan mulai dijalankan—dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Di balik angka-angka tersebut, ada kerja bersama yang melibatkan banyak pihak, dari pemerintah pusat dan daerah hingga para mitra pembangunan.

Program pembangunan 3 juta rumah menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan hunian, mengurangi backlog, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih dari itu, ini adalah tentang membuka akses—agar semakin banyak keluarga dapat memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau.

Di dalam majalah ini, pembaca akan menemukan beragam cerita. Tentang program unggulan, potret di lapangan, hingga berbagai upaya transformasi yang terus dilakukan untuk memperkuat sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Karena pada akhirnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal angka. Ini tentang kehidupan yang tumbuh di dalamnya—tentang harapan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik.

Mari melangkah masuk, dan temukan cerita di balik setiap rumah yang dibangun.

Menguatkan Peran Menjawab Kebutuhan Hunian Rakyat

Tugas dan Fungsi Kementerian PKP

Satu tahun perjalanan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arah, peran, serta komitmen dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat Indonesia. Di tengah tantangan sektor perumahan yang kompleks, Kementerian PKP terus memperkuat posisinya sebagai **garda terdepan dalam penyediaan hunian** yang layak dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024, Kementerian PKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari lingkup pekerjaan umum, guna membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Mandat ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa dalam menjalankan mandatnya, Kementerian PKP mengemban tiga peran strategis, yakni sebagai operator, regulator, dan fasilitator.

“Ada **tiga tugas penting** yang kami jalankan, yakni sebagai **operator, regulator, dan fasilitator** dalam mendorong semangat pembangunan perumahan di Indonesia,”
Menteri PKP

Sebagai **regulator**, Kementerian PKP berperan dalam menyediakan regulasi dan memberikan kemudahan dalam aspek perizinan yang berkaitan dengan perumahan. Sebagai **operator**, Kementerian PKP berperan langsung dalam menyediakan pembangunan dan/atau revitalisasi yang berkaitan dengan perumahan. Sebagai **fasilitator**, Kementerian PKP berperan dalam memberikan kemudahan yang berkaitan dengan akses terhadap perumahan. Tiga fungsi ini sejalan dengan upaya “Karpets Merah untuk Rakyat”

Target Kementerian PKP

Sejalan dengan visi pembangunan nasional Bersama **Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**, Kementerian PKP menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas perumahan, serta penguatan skema pembiayaan. Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah ditetapkan sebagai target prioritas Kementerian PKP dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Menteri PKP

Refleksi Satu Tahun

Dalam satu tahun, Kementerian PKP menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan perumahan nasional melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan lewat penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah khusus, serta dukungan infrastruktur dan fasilitas lingkungan guna menciptakan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Di sisi lain, akses pembiayaan perumahan terus diperluas melalui berbagai kebijakan seperti optimalisasi FLPP, kolaborasi dengan perbankan, dan penyesuaian skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Prioritas ke Depan

“Anggaran BSPS pada tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp8,9 triliun untuk menjangkau 400 ribu unit rumah. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Memasuki tahun 2026, Kementerian PKP memfokuskan percepatan Program 3 Juta Rumah melalui penguatan anggaran dan sinergi lintas sektor. **Dari total anggaran sebesar Rp10,89 triliun, sekitar 81,69% dialokasikan untuk program BSPS** sebagai upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Di sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan **penyaluran FLPP sebesar 350.000 unit**. Upaya ini diperkuat melalui kebijakan pembiayaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat penyediaan hunian yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.



Pembentukan Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para menteri **Kabinet Merah Putih** yang akan mendampingi jalannya pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk **periode 2024-2029**. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024.

Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru pemerintahan, sekaligus penguatan komitmen dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun dasar hukum pelantikan tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Di antara jajaran yang dilantik, **Maruarar Sirait** resmi mengemban amanah sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), didampingi oleh Wakil Menteri **Fahri Hamzah**.

Kepemimpinan ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan.



MARUARAR SIRAIT

Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Membangun Hunian Mewujudkan *Asta Cita*



Pemenuhan hunian yang layak, aman, dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berperan strategis dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Tantangan dan Permasalahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemenuhan hunian layak bagi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap perumahan terjangkau, keterbatasan lahan dan infrastruktur, serta pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat. Kondisi ini menuntut upaya yang terencana dan berkelanjutan agar penyediaan hunian tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan permukiman yang aman dan sehat.

Salah satu tantangan utama adalah **masih tingginya backlog perumahan** dan keberadaan rumah tidak layak huni di berbagai daerah. *Backlog* kepemilikan rumah di Indonesia tercatat sekitar 9,9 juta unit, sementara *backlog* kelayakhunian mencapai sekitar 26,9 juta unit, sehingga penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar yang memerlukan percepatan dan kolaborasi berbagai pihak.

Program Strategis PKP sebagai Solusi Penyediaan Hunian Layak

Untuk menjawab berbagai tantangan dibidang perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan **program strategis yang terintegrasi**, meliputi pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penguatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program utama tersebut antara lain penyediaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP bagi MBR, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui program BSPS, serta pembangunan rumah susun dan penataan kawasan permukiman guna mendukung penyediaan hunian layak, khususnya di wilayah perkotaan.



Program Perumahan dalam Mewujudkan *Asta Cita*



Berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas hunian yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga dalam **meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara menyeluruh**. Penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.



Upaya tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata Kementerian PKP sebagai pendukung utama **Asta Cita ke-6**, yaitu **pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan**. Melalui penyediaan hunian layak dan penataan kawasan permukiman, masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan aman, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta membuka peluang ekonomi di tingkat lokal.

Selain itu, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga berkontribusi dalam mendukung **Asta Cita ke-3**, yaitu **peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan lingkungan hunian yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang keluarga**. Di sisi lain, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau turut mendukung **Asta Cita ke-8**, yaitu **penguatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui pengembangan kawasan permukiman yang lebih tertata, inklusif, dan ramah lingkungan**.

Setahun KEMENTERIAN PKP



Realisasi Anggaran Tinggi, Komitmen Pembangunan Terjaga

Dalam kurun waktu satu tahun, Kementerian PKP menunjukkan kinerja yang signifikan dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional. Hingga Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai **Rp4,53 triliun atau 96,21 persen** dari total pagu Rp5,27 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas permukiman di berbagai daerah.

Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hunian untuk Masyarakat

Sebagai operator pembangunan perumahan, Kementerian PKP telah menyalurkan berbagai program strategis, antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas **45.073 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**, pembangunan **2.270 unit rumah susun**, serta penyediaan **476 unit rumah khusus** bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan juga diwujudkan melalui pembangunan **4.500 unit prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), sanitasi**, serta penanganan kawasan kumuh sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman.



Perluasan Akses Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat

Di sisi fasilitasi pembiayaan, berbagai terobosan kebijakan turut memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (**FLPP**) berhasil mencapai **278.868 unit** rumah, didukung kebijakan **pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) BI** serta kolaborasi pembiayaan melalui skema kredit program perumahan. Pelonggaran GWM oleh Bank Indonesia tersebut turut berkontribusi pada peningkatan kuota FLPP dan memperluas jangkauan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan pembiayaan rumah sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.

Gotong Royong dan Kolaborasi: Kunci Keberhasilan Program Perumahan

Semangat gotong royong menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan program perumahan nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan perumahan rakyat. Dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (**CSR**) menjadi bentuk nyata partisipasi berbagai pihak dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak.

Berbagai contoh nyata gotong royong tersebut terlihat dalam program renovasi rumah tidak layak huni dan penyediaan hunian bagi masyarakat melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta, lembaga sosial, dan pemerintah daerah. Melalui dukungan CSR, ribuan unit rumah dapat dibangun maupun direnovasi untuk masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam penanganan pascabencana dan peningkatan kualitas permukiman.

20 PROGRAM STRATEGIS PERUMAHAN



Membangun Ekosistem Perumahan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Secara keseluruhan, **capaian dan terobosan** yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir menunjukkan bahwa **pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada penguatan ekosistem perumahan berbasis kolaborasi dan gotong royong**. Melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kementerian PKP terus berupaya menghadirkan solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan hunian layak sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.



- 1 **BPHTB Gratis** untuk MBR
- 2 **PBG Gratis** untuk MBR
- 3 **PPN DTP 100%**
- 4 **Pelonggaran GWM BI** mengakibatkan Kenaikan Kuota FLPP
- 5 **BSPS Swasta**
- 6 **Kredit Program Perumahan**
- 7 **FLPP Swasta**
- 8 **FLPP Segmentasi**
- 9 **Akad Massal 26.000 unit KPR FLPP**
- 10 **Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir**
- 11 **Efisiensi BSPS melalui skema Pemilihan Toko Terbuka**
- 12 **Akad Massal 50.030 unit KPR FLPP**
- 13 **Penyediaan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Sumatera**
- 14 **Peningkatan BSPS menjadi sebesar 400.000 unit tahun 2026**
- 15 **Realisasi FLPP 2025 mencapai 278.868 unit**
- 16 **Pemanfaatan Kawasan Meikarta**
- 17 **Penurunan Suku Bunga Kredit Ultra Mikro sebesar 5%**
- 18 **Realisasi Gentengisasi**
- 19 **Penghapusan SLIK OJK dibawah 1jt**
- 20 **Serapan Tertinggi dalam bidang kerja Komisi V DPR RI**



Mengenal **LOGO** Kementerian PKP

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian PKP dan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP diperlukan strategi komunikasi dalam pengembangan dan penguatan identitas visual Kementerian PKP yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Logo Kementerian PKP dikonstruksikan dari beberapa elemen geometri dengan filosofi **Rumah, Gotong Royong, Identitas Bangsa, dan Berkelanjutan**. Oleh karena filosofi tersebut, logo Kementerian PKP diupayakan untuk selalu dapat digunakan pada setiap aplikasi media.

Warna sangat membantu membangun perhatian dan asosiasi dengan brand. Warna logo PKP adalah bagian vital dari keseluruhan logo dan harus selalu digunakan sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam buku ini tanpa pengecualian untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan citra PKP sendiri. Logo Kementerian PKP memiliki 2 warna utama, yaitu:

Khaki

Memiliki filosofi kesederhanaan, fungsionalitas, kebumihan, serba guna, netralitas, rendah hati, kekuatan, dan dapat diandalkan.

Midnight Green

Memiliki filosofi keseimbangan, harmoni, alami, berkelanjutan, ketahanan, adaptasi, kebijaksanaan, dan intuisi kuat, serta ketajaman spiritual.

Sumber : SE 03 SE Sj 2025 Panduan Penggunaan Logo



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA



Rumah

Rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya. Hal ini menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk **menghadirkan dan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi rakyat**.



Gotong Royong

Kombinasi bentuk geometri ini melambangkan gotong royong, dimana sejalan dengan tujuan Kementerian PKP dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau secara gotong royong dengan mengikutsertakan **seluruh stakeholders** sebagai pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut.



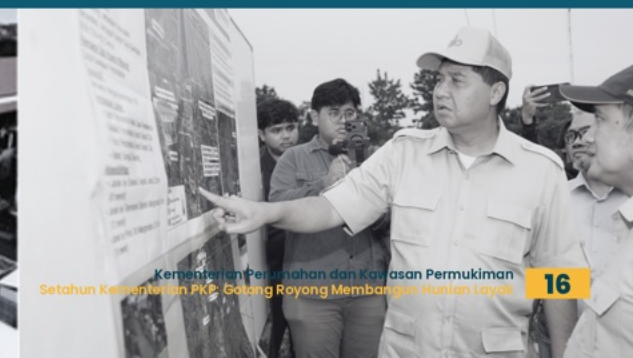
Identitas Bangsa

Kombinasi geometri ini melambangkan Identitas Bangsa Indonesia (Garuda), yang menunjukkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya. Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan **Pancasila sebagai acuan utama** dalam membuat kebijakan yang pro rakyat.



Berkelanjutan

Bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus **memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam**, dengan **konsep yang berkelanjutan** baik dari fungsi maupun bentuk.





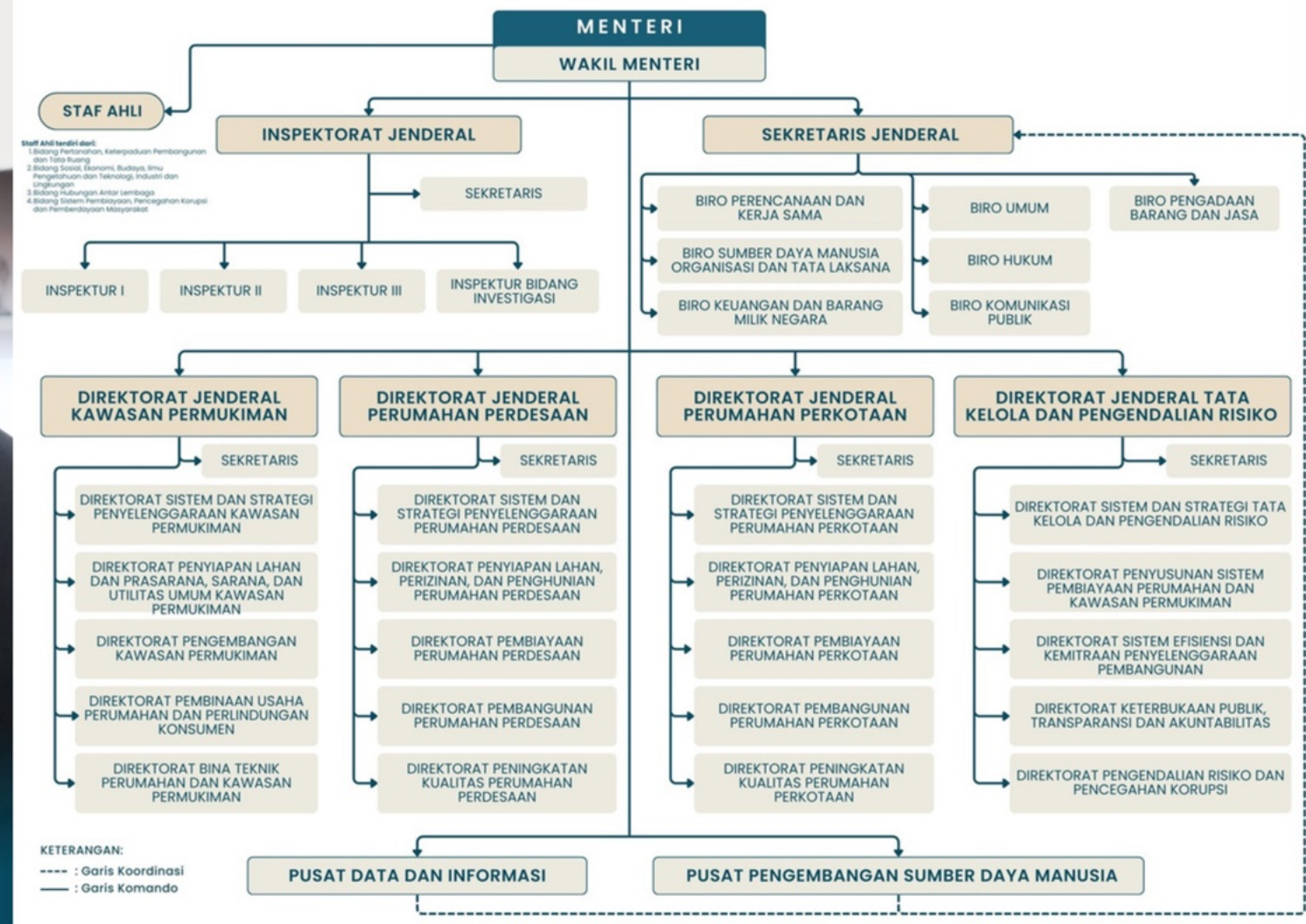
8 Pelantikan ESELON 1 KEMENTERIAN PKP

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) **Maruarar Sirait** melantik sebanyak **8 (delapan) Pejabat Tinggi Madya** di lingkungan **Kementerian PKP** di Jakarta, Senin (20/1/2025). Pelantikan ini untuk mengukuhkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025** tanggal 17 Januari 2025.

Sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi dilantik, yakni Didyk Choirul, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Ir. Fitrah Nur, M.Si sebagai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,

Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H., S.I.K., M.Hum sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H sebagai Inspektur Jenderal, Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan, serta Budi Permana sebagai Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP.

Struktur Organisasi Kementerian PKP



Struktur organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program secara terintegrasi dalam mencapai sasaran strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian PKP dipimpin oleh Menteri dan Wakil Menteri, yang didukung oleh 4 Staf Ahli, 6 Unit Organisasi, serta 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT).



MURI Akad Massal Rumah Subsidi

Akad massal **26.000 unit KPR FLPP** di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada **29 September 2025**, yang diselenggarakan oleh Kementerian PKP bersama BP Tapera sukses memecahkan rekor sebagai akad massal rumah subsidi terbesar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh **Bapak Presiden RI Prabowo Subianto** yang menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis sebagai motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga mengaku bangga atas hadirnya pelaku-pelaku usaha baru di sektor perumahan, termasuk kisah inspiratif Wawan dan Angga yang dulunya seorang *office boy* kini mampu meraih keuntungan Rp120 miliar per tahun dari bisnis properti. *“Tidak pakai nyolong, tidak pakai korupsi. Ini putra Indonesia yang harus kita banggakan. Saya jenderal, saya hormat sama kau. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga dan Wawan-Wawan lain,”* ucap Prabowo dengan penuh rasa haru.



READ MORE



Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penyerahan **26.000 unit rumah** ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sebanyak **200 keluarga** menerima kunci secara langsung, sementara sisanya dilakukan serentak secara daring. *“Yang membuat kita bangga, penerima rumah ini adalah wajah-wajah pejuang kehidupan sehari-hari, tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, dan lain-lain. Mereka adalah tulang punggung bangsa, dan hari ini negara hadir untuk mereka,”* ujar Menteri PKP.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil, mulai dari BPHTB gratis, percepatan dan pembebasan biaya PBG, hingga kenaikan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit—terbesar dalam sejarah—serta menjaga bunga FLPP tetap 5%. Menteri Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi FLPP menjadi solusi utama mengatasi *backlog* kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit.



Gotong Royong Bangun Negeri Wujudkan Hunian Layak Lewat Program BSPPS

Rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan awal dari ekosistem kehidupan yang sehat dan martabat sebuah keluarga dimulai dari hunian yang layak. Di tengah tantangan kebutuhan rumah di Indonesia, hadir sebuah program yang tidak hanya membangun dinding dan atap, tetapi juga membangkitkan jiwa kebersamaan rakyat.

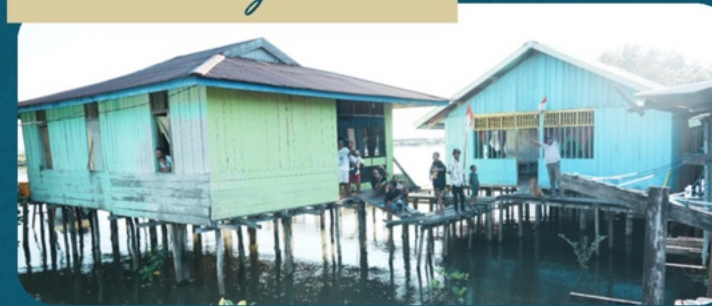
Mengenal Program BSPPS



BSPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas atau membangun rumah baru secara swadaya. Program ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri dengan asas gotong royong.



Sasaran dan Tujuan Utama



Ditujukan bagi WNI berkeluarga yang memiliki rumah tidak layak huni dan termasuk dalam desil 4 kebawah atau berpenghasilan maksimal setingkat UMP. Tujuannya menggerakkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Bantuan perbaikan rumah berkisar antara Rp20 Juta hingga 40 Juta per unit, tergantung pada wilayah geografis seperti daerah terpencil, hingga wilayah Papua dan Maluku Utara.

Pembangunan Rumah Baru Swadaya

Pembangunan rumah baru guna mengganti rumah yang rusak total, pemerintah memberikan bantuan mulai dari Rp50 Juta hingga maksimal Rp70 Juta di wilayah pegunungan atau pulau kecil.





Kredit Program Perumahan (KPP)

Menggerakkan Ekosistem Perumahan

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Salah satu terobosan tersebut adalah **Kredit Program Perumahan (KPP)** atau saat ini lebih dikenal dengan **KUR Perumahan**, yakni skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung sektor perumahan secara menyeluruh, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan rumah.

KPP merupakan kredit berbasis skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam ekosistem perumahan, seperti **pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku**

UMKM yang ingin memperbaiki rumahnya yang akan dimanfaatkan untuk usaha. Melalui program ini, pemerintah memberikan akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau dan proses yang relatif mudah, sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan rumah sekaligus menggerakkan perekonomian di sektor perumahan dan industri turunannya.

**ANGGARAN KPP
DI TAHUN 2025
130 TRILIUN**

Sejak diluncurkan pada bulan **Oktober 2025**, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara aktif melakukan sosialisasi KPP di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap manfaat program ini. Sosialisasi dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, perbankan penyalur, serta para pemangku kepentingan di sektor perumahan, sehingga informasi mengenai program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi KPP tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat.

Pada sejumlah kegiatan, bank penyalur membuka layanan konsultasi dan pengajuan kredit di lokasi sosialisasi, sehingga calon debitur dapat langsung mengajukan kredit setelah memperoleh penjelasan mengenai mekanisme dan persyaratan program. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran pembiayaan serta memperkuat ekosistem perumahan nasional.



Sosialisasi KPP di Universitas Parahyangan, Bandung.

Sejarah Penurunan Bunga PNM

Selama bertahun-tahun, bagi jutaan perempuan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia, **PNM Mekaar** bukan sekadar program pembiayaan. Ia adalah harapan—modal awal untuk membuka warung kecil, menambah stok dagangan, membeli alat produksi, hingga menjaga roda ekonomi keluarga tetap berputar.

Sejak pertama kali diluncurkan pada **2015**, program **Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)** hadir dengan satu ketentuan yang nyaris tak berubah: suku bunga pinjaman sebesar **25%** per tahun. Angka ini menjadi bagian dari perjalanan panjang PNM Mekaar dalam menjangkau perempuan prasejahtera yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan formal.

Selama 10 tahun, bunga tersebut tetap bertahan. Tidak ada penyesuaian, tidak ada penurunan. Stabilitas ini menjadi ciri khas program sekaligus bukti konsistensi dalam mendukung jutaan nasabah ultra mikro di seluruh Indonesia. Hingga akhirnya, sejarah baru tercipta pada Februari 2026.

Dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sumedang, yang mempertemukan Kementerian PKP, BP Tapera, BRI Group, PNM, dan SMF, pemerintah bersama BRI Group resmi mengumumkan **penurunan suku bunga kredit ultra mikro untuk nasabah PNM Mekaar**. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, bunga pinjaman **dipangkas sebesar 5%, dari 25% menjadi 20%** per tahun. Kebijakan ini secara langsung menysasar 16,2 juta nasabah ibu-ibu Mekaar di seluruh Indonesia.

“
Bagi banyak orang, penurunan 5% mungkin hanya terlihat sebagai angka. Namun bagi para nasabah Mekaar, ini berarti **angsuran yang lebih ringan, ruang bernapas yang lebih lega, dan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha tanpa tekanan beban pinjaman yang terlalu tinggi.**”

Direktur Corporate Banking BRI Group, Riko Tasmaya, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah bersejarah sekaligus bentuk keberpihakan nyata kepada perempuan wirausaha ultra mikro. Setelah PNM bergabung dalam Holding Ultra Mikro, ruang untuk transformasi yang lebih inklusif semakin terbuka. Penurunan bunga ini diharapkan menjadi jembatan agar lebih banyak perempuan dapat naik kelas secara ekonomi dan terhindar dari jeratan kredit informal maupun pinjaman berbunga tinggi.

Lebih dari sekadar kebijakan pembiayaan, langkah ini menjadi simbol bahwa akses ekonomi yang adil harus dimulai dari kelompok paling dasar—mereka yang setiap hari berjuang menjaga dapur tetap mengepul dan masa depan keluarga tetap berjalan.

PNM Mekaar kini memasuki babak baru. Dengan semangat yang sama, namun dengan beban yang lebih ringan, jutaan perempuan Indonesia melangkah lebih percaya diri menuju usaha yang lebih berkembang, kehidupan yang lebih sejahtera, dan masa depan yang lebih layak.

Ini sejarah! Selama 10 tahun tidak pernah ada penurunan suku bunga untuk kredit ultra mikro. Hari ini kita lakukan.

Maruar Sirait
Menteri PKP

Kabar

Program 3 Juta Rumah 2025: Capaian, Tantangan, dan Langkah Ke Depan

Program 3 Juta Rumah mencatat progres pelaksanaan yang konsisten sepanjang tahun 2025 dalam upaya memperluas akses hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). **Kementerian PKP** memastikan program ini tetap berjalan sebagai prioritas untuk mengurangi *backlog* perumahan.

*"1 Juta di perkotaan
1 Juta di perdesaan,
dan 1 Juta di pesisir."*

Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia



278,9k	34,6T	40	22	8.113	13.249	33	401
UNIT	Nominal FLPP	Bank	Asosiasi	Pengembang	Perumahan	Provinsi	Kab/Kota

Dalam rangka melaksanakan amanat PSN dan RPJMN 2025–2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang strategi pencapaian Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah secara tepat sasaran, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik APBN Kementerian dan non-Kementerian, kontribusi pengembang, swadaya masyarakat, maupun skema gotong royong.

Program ini mencakup pembangunan hunian baru serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, guna memastikan ketersediaan hunian yang sehat, layak, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hingga triwulan akhir tahun 2025, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah menunjukkan progres yang konsisten. Penyaluran KPR Subsidi melalui skema **FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)** mencapai **278.868 unit** sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, atau 79,68% dari target 350.000 unit, dengan nilai Rp34,64T —menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP.



Penyaluran tersebut melibatkan sebanyak 40 bank penyalur dan 22 asosiasi perumahan, yang tersebar di 13.249 perumahan, dikelola oleh 8.113 pengembang, serta menjangkau 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

Berdasarkan data BP Tapera, realisasi FLPP menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan capaian tertinggi sebanyak 62.591 unit, sementara pada tingkat kabupaten/kota, capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebanyak 14.702 unit.

Sementara itu, realisasi Program 3 Juta Rumah melalui skema **BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)** pada tahun 2025 berhasil mencapai total **45.073 unit** rumah. Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian tertinggi sebanyak 7.534 unit.

Pemerintah juga turut membangun **rumah susun** sebanyak **2.270 unit** untuk berbagai kementerian dan lembaga, serta membangun **476 unit rumah khusus** di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2025.

Intervensi ini dioptimalkan dengan adanya peningkatan **prasarana dan sarana umum (PSU) dan sanitasi**, serta penanganan kawasan kumuh di **4.500 titik** sebagai bagian dari penguatan kualitas permukiman.

Dukungan diperkuat oleh sektor swasta melalui program **CSR (Corporate Social Responsibility)** yang berkontribusi pada renovasi rumah sebanyak **9.701 unit**, dengan PT Djarum sebagai penyumbang terbesar sebanyak **1.608 unit** rumah.

Kab Bekasi	14,702
Kab Bogor	10,195
Kab Tangerang	8,246
Kab Karawang	7,079
Kota Kendari	6,895
Kab Maros	6,233
Kota Palembang	6,198
Kab Deli Serdang	5,992
Kab Kubu Raya	5,246

Sumber: Data BP Tapera



Tantangan Program 3 Juta Rumah

Backlog Perumahan : 43.368.890 keluarga (desil 1-10)
Backlog Kepemilikan : 13.431.849 keluarga ; Backlog RTLH : 29.937.041 keluarga



Langkah 2026

Sinergitas program menjadi kunci percepatan realisasi **Program 3 Juta Rumah** pada tahun 2026. Komitmen ini tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian PKP menjadi **Rp10,89 triliun**, dengan sekitar **81,69%** atau **Rp8,9 triliun** difokuskan pada **program BSPS** yang menjangkau **400.000 unit rumah**. Kebijakan ini menegaskan keberpihakan pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Program BSPS juga mengalami peningkatan signifikan delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Selain BSPS, pemerintah juga mendorong pembangunan **Rumah Susun** sebesar Rp382,55 miliar untuk **743 unit**, serta **Rumah Khusus** sebesar Rp242,20 miliar untuk **607 unit**. Dukungan juga mencakup **Bantuan PSU** sebesar Rp29,08 miliar untuk **2.007 unit**, serta **Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi** sebesar Rp191,85 miliar yang mencakup 225 hektare kawasan dan **3.000 unit** sanitasi. Intervensi ini dirancang untuk menjangkau kawasan pesisir, perkotaan, hingga perdesaan secara merata. Secara keseluruhan, program ini menargetkan dukungan terhadap **406.357 unit** hunian.

Di sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan penyaluran **FLPP** sebesar **350.000 unit**, didukung melalui **KUR Perumahan** dan insentif **PPN DTP**, serta diperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui pemanfaatan **CSR**. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) mencatat **backlog kepemilikan rumah masih mencapai sekitar 9,9 juta unit**, sementara **backlog rumah tidak layak huni (RTLH) berada di kisaran 26,9 juta unit**.

Dari sisi pembiayaan, tantangan utama terletak pada **keterbatasan anggaran** dan akses pembiayaan yang inklusif. Pagu anggaran Kementerian PKP yang sekitar Rp3,4 triliun saat ini hanya mampu mendukung pembangunan sekitar 270 ribu unit. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sumber pendanaan jangka panjang dengan biaya yang terjangkau untuk menjaga keberlanjutan program.

Selain itu, **akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan** juga masih menjadi kendala, terutama terkait rekam jejak kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dapat menyulitkan dalam memenuhi persyaratan perbankan untuk memperoleh KPR subsidi bagi MBR.

Di balik capaian yang telah diraih, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kebutuhan hunian yang tinggi. Harga tanah yang terus meningkat berdampak pada keterbatasan penyediaan rumah terjangkau di lokasi strategis.

Di sisi lain, lahan milik negara maupun aset BUMN yang berpotensi dimanfaatkan belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala administratif, legalitas, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Backlog perumahan dan kondisi rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan struktural yang signifikan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga dengan kualitas hunian yang belum memenuhi standar layak huni di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penyediaan perumahan tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan unit baru, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.

PAGU ANGGARAN

2025

Rp5,27 Triliun



2026

Rp10,89 Triliun

81,69% / Rp8,9 T
untuk 400.000 unit
program BSPS



Regulasi Baru

Rumah Layak Huni Semakin Dekat!



Aturan Baru MBR Bukan Jalan Lebih Banyak Keluarga Punya Rumah

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi menerbitkan **Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025** tentang **Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah** serta **Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah**, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni.

Bagi banyak masyarakat Indonesia, memiliki rumah sendiri masih menjadi impian besar yang tidak selalu mudah diwujudkan. Kenaikan harga properti, keterbatasan daya beli, hingga persyaratan pembiayaan yang ketat sering kali menjadi tantangan utama, khususnya bagi MBR. Melalui regulasi baru ini, pemerintah melakukan penyesuaian **batas maksimal penghasilan** agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.



Apa itu MBR?



MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) merupakan masyarakat yang mempunyai **keterbatasan daya beli** sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.



KRITERIA MBR

Penghasilan perorangan **sesuai dengan besaran** pada tabel di bawah

Berstatus **WNI** (Warga Negara Indonesia)

Belum memiliki rumah atau belum pernah menerima subsidi perumahan

Memenuhi ketentuan dan persyaratan lain sesuai **peraturan perundang-undangan**

BESARAN PENGHASILAN MBR TERBARU



Zona	Umum		Satu Orang Untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
Zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat	Rp8.500.000,-	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-
Zona 2 Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali	Rp9.000.000,-	Rp11.000.000,-	Rp11.000.000,-
Zona 3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya	Rp10.500.000,-	Rp12.000.000,-	Rp12.000.000,-
Zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat	Rp12.000.000,-	Rp14.000.000,-	Rp14.000.000,-

Dengan naiknya batas penghasilan ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian pemerintah untuk bisa terus meningkatkan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses perumahan murah.

Maruarar Sirait
Menteri PKP



Dari Office Boy Menjadi Direktur Utama: Perjalanan Inspiratif Angga Budi Kusuma di Dunia Properti

Di tengah persaingan industri properti yang semakin kompetitif, nama **Angga Budi Kusuma** menjadi bukti bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh latar belakang atau modal besar. Direktur Utama Pesona Kahuripan Group ini memulai kariernya dari posisi paling dasar sebagai **office boy (OB)**, dan kini memimpin salah satu pengembang perumahan subsidi yang dikenal luas di Indonesia.

Perjalanannya dimulai pada 2017 saat ia bekerja sebagai OB di Pesona Kahuripan di Cileungsi, Bogor. Tugasnya sederhana, mulai dari membersihkan kantor, mencuci motor karyawan, hingga menyiram tanaman. Namun dari pekerjaan tersebut, ia justru menemukan makna baru dalam hidup.

Di sana, Angga bertemu dengan mentornya, Wawan Triyanto, yang memberinya bukan hanya pelajaran bisnis, tetapi juga nilai hidup. Ia diajarkan bahwa keberhasilan bukan sekadar tentang memiliki, melainkan tentang memberi manfaat bagi orang lain. Prinsip inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam perjalanan kariernya.

Dalam waktu hanya tujuh bulan, Angga dipercaya menjadi direktur di salah satu perusahaan Pesona Kahuripan pada 2018. Setahun kemudian, perusahaan tersebut masuk 10 besar pengembang properti nasional. Pada 2020, ia menjadi Direktur Utama sekaligus pemegang saham terbesar, meski tanpa latar belakang properti atau modal besar.

Di bawah kepemimpinannya, Pesona Kahuripan Group berkembang dari PK 1 hingga PK 11 dengan lebih dari 13.000 unit rumah di Bogor dan Bekasi. Pada 2023, perusahaan ini meraih Rekor MURI atas penjualan 1.000 unit rumah dalam satu hari. Hingga 2025, telah terealisasi sekitar 12.500-15.000 unit rumah subsidi untuk MBR.

Meski memimpin perusahaan beromzet triliunan dan meraih berbagai penghargaan seperti Golden Property Awards 2023, Apersi Award 2024, dan The Best Affordable Housing Developer 2025, Angga tetap hidup sederhana tanpa simbol kemewahan, bahkan bekerja tanpa ruang kerja pribadi.

Ia menerapkan budaya kerja humanis dengan fleksibilitas bagi karyawan, meyakini bahwa kebahagiaan mendorong produktivitas. Dalam bisnis, ia juga menekankan kualitas rumah subsidi dengan margin yang lebih bijak, demi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diusung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Saat Menteri PKP meninjau Perumahan Pesona Kahuripan di Bogor, **Angga menyatakan dukungannya terhadap program tersebut dan siap berkontribusi lebih besar dalam pembangunan perumahan rakyat.**

Bagi Angga, kesempatan tersebut bukan sekadar urusan bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut membangun kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan Angga Budi Kusuma adalah gambaran nyata bahwa kesuksesan besar bisa lahir dari langkah kecil, selama dijalani dengan kerja keras, kejujuran, dan keyakinan yang kuat. Dari seorang office boy hingga menjadi direktur utama, kisahnya menjadi inspirasi bahwa latar belakang bukanlah batas, melainkan titik awal untuk melangkah lebih jauh.



**Rekor MURI 2023:
Pesona Kahuripan Group
1.000 UNIT TERJUAL
dalam 1 hari**

Pesona Kahuripan 9 di Setusari, Cileungsi, Bogor

5

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman *Dengan Penyerapan Tertinggi*



87,14%

3. BP3KP Sumatera II

Rusun 16 unit/1 lokasi

Wilayah Kerja:
Sumatera Utara

BSPS 1.992 unit

CSR 150 unit dari 190 unit

PSU 1 lokasi / 50 unit

FLPP 8.734 unit - 1,03Triliun

Penyalur terbesar
btn

Pengembang terbesar
REI



90,15%

1. BP3KP Jawa III

Rusun 131 unit/3 tower

Wilayah Kerja:
Jawa Tengah - D.I. Yogyakarta

BSPS 7.613 unit

CSR 2.471 unit dari 5.034 unit

FLPP 17.902 unit - 2,13Triliun

Penyalur terbesar
btn

Pengembang terbesar
HIMPERRA



88,10%

2. BP3KP Jawa IV

Rusun 96 unit / 3 tower

Wilayah Kerja:
Jawa Timur

BSPS 4.165 unit

CSR 1.137 unit dari 3259 unit

PSU 2 lokasi / 192 unit

FLPP 13.560 unit - 1,6Triliun

Penyalur terbesar
btn btn syariah

Pengembang terbesar
APERSI



84,14%

4. BP3KP Sumatera I

Rusun 64 unit / 2 tower

Wilayah Kerja:
Aceh

BSPS 2.602 unit

CSR 52 unit dari 119 unit

PSU 1 lokasi / 50 unit

FLPP 572 unit - 184,8 M

Penyalur terbesar
btn syariah

Pengembang terbesar
REI



80,37%

5. BP3KP Jawa II

Rusun 21 unit / 1 tower

Wilayah Kerja:
Jawa Barat

BSPS 6.374 unit

CSR 442 unit dari 2.961 unit

FLPP 48.192 unit - 6,03Triliun

PSU 1 lokasi / 50 unit

Sanitasi 1 lokasi / 56 unit

PANEL RISHA 1 140 unit

Penyalur terbesar
btn

Pengembang terbesar
APERSI



RISHA

Solusi Percepatan Pembangunan Rumah

RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) merupakan inovasi teknologi konstruksi berbasis sistem *knock-down modular* dengan material utama beton bertulang dan sambungan baut, yang dirancang untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama dalam konteks pascabencana. Sistem ini memungkinkan pembangunan rumah secara cepat, efisien, dan tetap memenuhi standar teknis (SNI).

Dari sisi inovasi dan keunggulan, RISHA memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari konstruksi konvensional, seperti **kecepatan pembangunan** (± 24 jam untuk satu modul kecil), **efisiensi biaya**, **fleksibilitas pengembangan**, serta **ketahanan gempa yang telah teruji**. Sistem ini juga memungkinkan pembangunan hingga dua lantai (dengan batasan tertentu), serta memudahkan perawatan karena sambungan dapat diperiksa secara berkala. Keunikan lain terletak pada penggunaan komponen standar pabrik yang meminimalkan risiko kegagalan konstruksi dan meningkatkan konsistensi kualitas bangunan di berbagai lokasi.

Secara sistem kerja, RISHA **mengandalkan prinsip modular** (umumnya modul 3x3 meter) yang disusun dari panel-panel pracetak seperti panel balok (P1), panel kolom (P2), dan panel sudut (P3) yang saling terkunci menggunakan baut berpresisi tinggi. Struktur ini bekerja sebagai *space frame system* di mana kekuatan bangunan berasal dari kesatuan modul dan kekakuan sambungan, bukan dari satu elemen tunggal.

RISHA digunakan sebagai **struktur dasar Hunian Tetap (Huntap)** karena mampu menjawab kebutuhan mendesak: menyediakan rumah yang aman, kuat, dan terjangkau dalam waktu singkat, tanpa mengorbankan kualitas bangunan.

Dinding dalam sistem RISHA bersifat non-struktural sehingga fleksibel dalam pemilihan material (bata ringan, gipsum, dll.), namun elemen strukturalnya tidak boleh dimodifikasi, dibor, atau dibebani sembarangan karena dapat menurunkan kinerja struktur.

RISHA merupakan hasil riset dan pengembangan **Kementerian PUPR** (melalui Puskim) yang telah diterapkan di berbagai wilayah rawan bencana di Indonesia, termasuk pasca gempa Lombok 2018, di mana banyak bangunan RISHA terbukti tetap berdiri tanpa kerusakan signifikan. Secara konseptual, RISHA sejalan dengan pendekatan *Build Back Better and Safer*, yakni membangun kembali dengan standar yang lebih tahan terhadap risiko bencana di masa depan.

Dalam penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatera bulan Desember 2025, Kementerian PKP juga menghadirkan RISHA sebagai opsi dalam upaya **rehabilitasi dan rekonstruksi rumah** terdampak bencana dengan mempertimbangkan keunggulannya yang cepat dan efisien.



Pak Samin, Tukang Bakso Keliling

TANPA SLIP GAJI, TETAP BISA PUNYA RUMAH SENDIRI

Bapak Samin ialah seorang pedagang bakso keliling yang berusia 43 tahun di Serang, Banten. Sebelumnya, ia bersama istri dan keempat anaknya tinggal di kontrakan sederhana di daerah Rau, Serang, Banten. Dalam waktu lama, ia bermimpi untuk bisa memiliki sebuah rumah miliknya sendiri yang bisa ia tinggali dengan layak bersama keluarganya.

Namun, untuk mengajukan KPR, ia selalu saja dimintai slip gaji, sesuatu yang sayangnya tak pernah ia miliki selaku pekerja informal. "Dulunya saya ingin punya rumah di sini (Puri Harmoni Indah), cuma saya ragu karena persyaratannya tidak memadai, tiap saya datang ke sales-nya selalu ditolak karena saya yang tidak ada slip gaji."

Waktu terus berjalan; kebijakan pemerintah berganti. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, melalui Kementerian PKP, kini pekerja informal seperti Pak Samin bisa memiliki rumah sendiri melalui program KPR FLPP tanpa memerlukan slip gaji. "Alhamdulillah, katanya bisa nggak pakai slip gaji juga."

Kini, Pak Samin bisa tenang dan tersenyum bahagia. Kunci rumah barunya sudah di tangan. Istri dan keempat anaknya bisa hidup layak dan penuh kebahagiaan. Pak Samin punya cerita baru, bahwa memiliki rumah bukan lagi sekadar mimpi baginya, tetapi sudah menjadi kenyataan yang menjadi tempatnya untuk mewujudkan mimpi-mimpinya bersama keluarga tercinta.

Pemerintah melalui Kementerian PKP mendorong reformasi skema KPR subsidi FLPP agar lebih inklusif, khususnya bagi pekerja informal yang selama ini terkendala persyaratan administratif seperti slip gaji.

Melalui penyesuaian skema pembiayaan dan alokasi kuota khusus, pekerja *non-fixed income*—seperti pedagang, ojek, hingga pelaku UMKM—tetap dapat mengakses kredit rumah dengan menggunakan alternatif verifikasi kemampuan bayar, sehingga memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan formal.



Dari Gerobak ke Rumah Sendiri: Kisah Inspiratif Pak Samin

"Waktu liat brosur Puri Harmoni Indah waktu itu, saya tanyakan lagi soal slip gaji, alhamdulillah, katanya bisa nggak pakai slip gaji juga."

- Samin





WAJAH BARU RUMAH SUBSIDI: RENOVASI SEDERHANA, *Dampak Maksimal*

ATURAN RENOVASI RUMAH SUBSIDI



Tidak boleh mengubah struktur utama

Tidak boleh mengubah struktur utama, penambahan lantai dua atau merombak pondasi di bagian depan rumah subsidi termasuk dilarang selama rumah masih dalam cicilan.



Renovasi aman setelah 5 tahun

Aturan pemerintah menyebutkan rumah subsidi tidak boleh dijual, disewakan, atau diubah besar-besaran sebelum 5 tahun. Renovasi besar sebaiknya dilakukan setelah masa ini terlewati.



Perlu izin untuk perubahan besar

Jika ingin menambah bangunan permanen di bagian depan, kamu wajib mengurus izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Tanpa izin, renovasi bisa dianggap ilegal.

RENOVASI BAGIAN DEPAN RUMAH SUBSIDI



Kanopi Sederhana

Melindungi kendaraan dari panas & hujan, sekaligus membuat tampilan rumah lebih rapi.



Pagar Minimalis

Pagar minimalis dengan bahan besi hollow atau kombinasi kayu untuk keamanan dan estetika.



Cat Ulang Fasad

Cara paling mudah dan ekonomis untuk memberi tampilan baru. Warna netral atau earth tone memberi kesan modern dan bersih.



Menambakkan Taman Kecil

Taman kecil di depan menciptakan suasana rumah lebih sehat dan nyaman. Tanaman hias sederhana sudah cukup memberi kesan asri.



Mengganti Pintu dan Jendela

Penggantian pintu atau jendela dengan model lebih modern dapat memberikan perubahan signifikan pada tampilan rumah.



Membuat Teras Lebih Nyaman

Penambahan kursi santai, keramik baru, atau lampu dekoratif dapat membuat area depan rumah lebih nyaman untuk bersantai bersama keluarga.



Aksen Batu Alam atau Panel Dekoratif

Penambahan aksen dekoratif pada dinding depan memberi tampilan lebih elegan. Biaya terjangkau, hasil lebih modern dan menarik.

TIPS RENOVASI RUMAH SUBSIDI



Mulai dari Renovasi Ringan

Pilih ide renovasi yang ringan tapi tetap memberi efek visual besar, seperti cat ulang atau pagar minimalis.



Gunakan Kontraktor atau Tukang Terpercaya

Walau sederhana, pastikan renovasi dikerjakan dengan baik agar hasil rapi dan tidak membahayakan struktur rumah.



Konsultasikan dengan Developer atau Bank

Sebelum merenovasi, tanyakan dulu apakah renovasi yang direncanakan diperbolehkan agar tidak melanggar aturan.

Kolom ASN PKP DAN OPINI PUBLIK



Bangga karena bisa menjadi bagian dari Kementerian PKP sekaligus bisa mengabdikan ke Negara tercinta. Selain itu juga senang karena dapat pengalaman dan insight baru dari teman-teman yang datang dari seluruh Indonesia. Semoga bisa **terus berkontribusi** untuk mewujudkan rumah yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia^^



Adzraa Aqillah Yumnaa
PPSDM



MUAMMAR TAUFIK
BPSKP SUMATERA III

Pastinya sangat bangga bisa bergabung di salah satu **Kementerian paling strategis** ini di mana nasib mula kehidupan seorang manusia yang hidup dan bertempat tinggal di Indonesia di mulai dari sebuah ekosistem rumah dan baik regulasi, kebijakan dan sejenisnya itu berada di kementerian ini. Harapannya program 3 juta rumah sebagai motor memperoleh rumah layak huni berjalan lancar diiringi dengan **tepat waktu, mutu, biaya dan paling utama tepat sasaran.**

Johana Carolina Siliwire
BPSKP SULAWESI I

Jadi CPNS KemenPKP itu ternyata nggak sekaku yang dibayangin, justru seru dan penuh cerita. Ketemu orang-orang hebat, belajar hal baru tiap hari. Tidak selalu mudah, tapi disitulah prosesnya. Kita tumbuh, beradaptasi, dan jadi **versi diri yang lebih baik.**



Tiwi Ananda Aprilia
PPSDM

Menjadi CPNS di Kementerian PKP adalah pengalaman yang sangat berharga dan membanggakan bagi saya. Di sini saya tidak hanya belajar tentang pekerjaan, tapi juga tentang tanggung jawab, integritas, dan **arti kontribusi untuk masyarakat.** Kesempatan ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga **tanggung jawab** untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat Indonesia

Selama menjadi CPNS di Kementerian PKP, saya banyak belajar, terutama memahami bagaimana proses penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penghunian.

Ke depan, saya berharap program perumahan dapat semakin **tepat sasaran** dengan proses yang lebih sederhana **tanpa mengurangi kualitas.** Saya juga ingin terus belajar dan berkembang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik serta menjaga tanggung jawab sebagai ASN.



Naufal Yanzami
DITJEN PERKOTAAN

20 CAPAIAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1 Pembebasan BPHTB untuk MBR



2 Percepatan PBG



3 PPN ditanggung Pemerintah



4 Pelonggaran GWM BI & FLPP



5 BSPS Swasta



6 FLPP Swasta



7 Kredit Program Perumahan



8 FLPP Segmentasi (ART, Guru, Buruh, dan segmen lainnya)



9 Akad Massal Terbesar 26.000 KPR FLPP



10 Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir



11 Efisiensi BSPS 6% melalui Pemilihan Toko Bangunan Terbuka



12 Akad massal 50.030 unit di Banten



13 Pembangunan 2.603 Huntap untuk korban bencana sumatera



14 Kenaikan menjadi 400.000 program BSPS di tahun 2026



15 278.868 penyaluran FLPP di tahun 2025



16 Pembangunan Rusun di Meikarta 141.000 unit



17 Penurunan suku bunga kredit ultra mikro sebesar 5% untuk nasabah Mekaar



18 Gentengisasi.



19 Penghapusan SLIK OJK dibawah 1 jt.



20 Serapan Tertinggi dalam bidang kerja komisi V DPR RI.





**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**